

CONVERGENCE: JOURNAL OF GLOBAL DYNAMICS

Program Studi Hubungan Internasional, UIN Alauddin Makassar
ISSN: XXXX-XXXX (Print) | e-ISSN: XXXX-XXXX (Online)

PERAN SOSIAL MEDIA DI INDONESIA DALAM MEMBANGUN GERAKAN TRANSNASIONAL

Farahdiba Rahma Bachtiar¹, Ernawati²

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia. Email: farahdiba.rahma@uin-alauddin.ac.id

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia. Email: ernawatiii93@gmail.com

Abstract

This article examines victims of human trafficking from the province of Nusa Tenggara Barat (NTB). Existing research on human trafficking has been studied in general terms and rarely includes Indonesian migrant workers. In fact, perpetrators of human trafficking targeted migrant workers. This research was conducted using a qualitative descriptive method and literature study which aims to describe human trafficking of migrant workers from NTB. In addition, this study analyzes underlying factors of human trafficking within the circle of migrant worker groups from the province of NTB. This article employs several concepts as analytical tools, such as the concept of human trafficking and transnational organized crime. This articles contributes to provide recommendation for policy makers in regulating Indonesian migrant workers.

Keywords: human trafficking; Indonesian migrant workers; Nusa Tenggara Barat

Abstrak

Artikel ini membahas korban perdagangan orang dari provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Riset-riset terdahulu mengenai perdagangan orang mengkaji hal-hal umum saja dan jarang yang mengkaji pekerja migran Indonesia. Padahal, para pelaku kejahatan perdagangan orang menyoasar pekerja migran. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan studi pustaka yang bertujuan mendeskripsikan perdagangan orang para pekerja migran dari NTB. Selain itu, kajian ini menganalisis faktor yang menyebabkan perdagangan orang di kalangan pekerja migran di NTB. Artikel ini memakai beberapa konsep seperti perdagangan orang dan kejahatan transnasional terorganisir. Artikel ini berkontribusi memberikan rekomendasi bagi para pembuat kebijakan dalam mengatur para pekerja migran Indonesia.

PENDAHULUAN

Sosial media merupakan media komunikasi paling populer di dunia saat ini. Berdasarkan data pada 2019, terdapat sekitar 2,3 miliar pengguna sosial media di seluruh dunia dan jumlahnya mengalami peningkatan menjadi 4,5 miliar pada tahun 2021. Jumlah tersebut diperkirakan akan naik menjadi 5,8 pada tahun 2027 (Belle Wong, 2023). Di Indonesia sendiri, jumlah pengguna Facebook salah satu platform sosial media terbesar di dunia mencapai 135,05 juta orang atau peringkat Ketiga terbesar di dunia (Annur, 2023). Popularitas sosial media yang begitu cepat dan massif merupakan implikasi dari kemampuannya untuk menjangkau berbagai negara dan menghubungkan jutaan manusia di dunia.

Melalui sosial media setiap orang di setiap tempat dapat mengakses informasi, terhubung dan berbisnis satu sama lain (Westcott, 2011, p. 3). Hal ini menjadikan berbagai isu lokal bertransformasi menjadi isu transnasional dalam waktu yang singkat seperti migrasi, perubahan iklim, rasisme dan feminisme (Sorce & Dumitrica, 2022, p. 157). Alhasil, melalui sosial media, interaksi sosial, ekonomi, politik bahkan keagamaan terjadi tanpa batas waktu dan batas wilayah. Dengan kata lain, kedaulatan dalam konteks dunia digital dibatasi dan dimaknai secara berbeda dengan makna kedaulatan negara yang selama ini dipahami dalam Hubungan Internasional (HI). Secara tradisional, kedaulatan merupakan kepemilikan otoritas legal sebuah negara untuk membuat dan menegakkan hukum pada batas wilayahnya (Keohane, 2002, p. 69). Namun hal ini berbeda dengan konsep kedaulatan dalam dunia digital. Di dunia digital termasuk sosial media, sulit untuk membedakan dan membatasi lalu lintas informasi dan komunikasi. Hal ini sebab digital territories (wilayah digital) memiliki aturan yang berbeda dengan state territories (wilayah negara) (Belli & Horten, 2022, p. 13).

Perbedaan kedua konsep territories tersebut pada akhirnya telah mengubah prinsip dasar fenomena hubungan internasional secara signifikan (Taylor, 2002, p. 2). Sosial media memiliki keunggulan untuk menggabungkan fungsi berbagai media seperti televisi, radio dan komputer ke dalam satu medium yang mudah diakses atau diperoleh. Bahkan melalui sosial media, individu mampu melakukan interaksi dengan berbagai jejaringnya dalam waktu yang sama dan menghilangkan hambatan yang biasa dihadapi dalam interaksi tatap muka (lihat Dunbar, 2016). Sehingga tujuan dari interaksi hubungan internasional yang dilakukan melalui sosial media

bukan hanya sebagai alternatif dari interaksi tatap muka langsung namun menjadi inti dari interaksi tanpa batas wilayah. Peristiwa viralnya Demo 212 yang sampai ke negara lain menjadi bukti betapa mudah dan cepatnya isu nasional masuk ke sosial media dan meluas secara global (Quiano & Griffiths, 2016). Selain itu, gerakan #Metoo dari Amerika Serikat yang sampai ke Indonesia (Monika Winarnita, 2020) dan berbagai negara lainnya (Wang et al., 2020) juga membuktikan betapa sosial media bisa menjadi medium aktivisme transnasional yang efektif.

Untuk itu, dalam penelitian ini penulis berupaya pertama, untuk melihat lebih mendalam mengenai bagaimana dan sejauh mana sosial media digunakan untuk menjadi bagian dari gerakan sosial transnasional di Indonesia terutama oleh aktor non-negara seperti Lembaga Masyarakat Sipil (Civil Society Organisations), Lembaga Non Pemerintah (Non-governmental Organisations) atau bahkan individu. Kedua, penulis berupaya menelusuri bagaimana sosial media dapat digunakan secara efektif untuk membawa agenda-agenda sosial yang terjadi di Indonesia ke dunia internasional. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi krusial sebab secara praktis dan teoritis sosial media bukan dianggap sebagai topik yang krusial dalam mempengaruhi interaksi lintas batas negara. Meskipun sosial media sudah diakui sebagai salah satu kunci dari keberhasilan gerakan demokrasi Arab Spring di Timur Tengah seperti pada penelitian Wolfsfeld et al., (2013) dan alat diplomasi yang efektif sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Bjola (2016) dan Verreki (2017). Namun literatur bahkan kebijakan yang memadukan konteks HI dan sosial media masih terbatas, salah satunya adalah buku yang ditulis oleh Kreps (2020). Padahal data menunjukkan bahwa potensi sosial media sangat besar dalam aktivitas transnasionalisme termasuk dalam kaitannya dengan isu-isu sosial politik bahkan keagamaan di Indonesia.

Untuk mencapai dua tujuan penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Studi kasus dalam penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan lebih dalam (K.Yin, 2018) mengenai keterkaitan antara variabel dependen dalam hal ini peran sosial media dengan variabel independen yakni gerakan transnasionalisme di Indonesia (Klotz & Prakash, 2008, p. 49). Intensitas dan keberhasilan gerakan transnasional di tiap negara berbeda-beda, penelitian ini untuk itu mendalami kasus Indonesia melalui tingkah laku, nilai, praktik dan norma yang dilakukan oleh masyarakat sipil di Indonesia. Hal ini menjadikan penelitian mengenai peran sosial media dalam gerakan transnasionalisme dengan kasus Indonesia harus dipahami melalui pendekatan perbandingan kontekstual (contextualized comparison) (Sprinz & Wolinsky-nahmias, 2016, p. 34). Meskipun penelitian ini tidak akan secara spesifik mengukur keberhasilan atau intensitas suatu gerakan transnasionalisme.

Menggunakan data-data dari hasil penelitian sebelumnya serta laporan dan dokumen resmi, penelitian ini mengumpulkan informasi mengenai penggunaan dan kedudukan sosial media di Indonesia dan mengumpulkan literatur berdasarkan tema terkait konteks media dalam Hubungan Internasional dan gerakan transnasional di Indonesia. Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi kemudian dirangkum berdasarkan fokus penelitian, lalu dibandingkan dengan literatur, dan dianalisis oleh peneliti dengan melihat kesenjangan yang ada antara hasil penelitian ini dengan penelitian sebelumnya (Creswell & Creswell, 2018, p. 273).

TINJAUAN PUSTAKA

Diskursus dan perdebatan mengenai peran sosial media dalam Hubungan Internasional terus bergulir. Hal ini sebab, sosial media pada akhirnya mengubah berbagai konsep penting dalam Hubungan Internasional termasuk dan terutama konsep kedaulatan dan kekuasaan. Hal ini misalnya tergambarkan mulai dari redistribusi kekuasaan dan ekonomi, kemunculan ancaman-ancaman baru seperti pandemi, konsep baru kedaulatan dan pergeseran peran aktor. Kedaulatan misalnya tidak terbatas pada kedaulatan negara (*state sovereignty*) tapi ada konsep-konsep baru seperti kedaulatan digital (*digital sovereignty*) (lihat lebih jauh dalam Feindt et al., 2021). Sayangnya, meskipun studi mengenai sosial media dalam Hubungan Internasional seringkali dibahas bersama dengan topik mengenai globalisasi namun pembahasan sosial media dalam HI masih dianggap sebagai pelengkap dan terbatas.

Padahal sosial media memiliki peran yang cukup signifikan dalam berbagai interaksi lintas batas negara bukan hanya sebagai alat diplomasi baru namun juga sebagai media dalam membangun gerakan transnasionalisme. Sebagaimana media berperan dalam politik lokal untuk melakukan *check and balance* atau sebagai pilar keempat dalam demokrasi selain pilar kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Media juga telah melakukan pergeseran makna mengenai kekuasaan dalam HI yang sebelumnya terbatas pada konsep militer dan kedaulatan yang berkuat pada batas teritori atau wilayah. Sosial media sebagai media baru (*New Media*) seperti juga TV dan surat kabar memegang kekuasaan sosial (*social power*). Dalam konteks kekuasaan sosial, sosial media memiliki peran dalam dua hal, yakni membangun identitas dan narasi (Ham, 2010, pp. 91–93). Pertama, sosial media bisa berperan sebagai penguat nasionalisme atau identitas kebangsaan tertentu. Kedua, sosial media bisa membentuk narasi atau agenda politik tertentu yang menjadi propaganda atau alat diplomasi (Ham, 2010, pp. 91–92).

Sedangkan dalam konteks kedaulatan dalam kaitannya dengan gerakan transnasional, negara tidak lagi dapat membendung arus informasi ataupun data yang bebas untuk masuk maupun keluar dalam wilayah domestiknya. Sosial media juga menggambarkan bagaimana pengaruh dan tekanan eksternal yang mungkin tidak diinginkan muncul dari luar (Ham, 2010, p. 91). Hal ini menunjukkan bagaimana sosial media menjadi alat kekuasaan baru yang menantang konsep kekuasaan negara. Alhasil seringkali terjadi benturan kepentingan antara individu, negara dan perusahaan media (Feindt et al., 2021, p. 6).

Fungsi maupun peran sosial media dalam negara demokrasi cukup besar. Sebagaimana surat kabar dan radio serta televisi, sosial media dianggap efektif dalam konteks sosial politik karena mampu menghimpun dukungan publik (Harris, 2013, p. 16) dan membuat perubahan sosial (Harris, 2013, p. 21). Sayangnya, di negara yang kurang bahkan tidak demokratis, penggunaan sosial media bisa jadi tidak efektif karena masih bisa dikontrol dan dibatasi penggunaannya oleh penguasa. Sebagaimana kebijakan China dengan meregulasi platform digital dan melakukan sensor terhadap website asing (Ding, 2020). Meskipun sebagian kecil pakar masih optimis bahwa bagaimanapun sosial media tetap bisa berperan dalam transisi demokrasi negara otoritarian sekalipun (Ding, 2020).

Peran sosial media sebagai medium bagi gerakan transnasional menjadi penting. Hal ini sebab, karakteristik (nature) sosial media yang berbeda dengan media lainnya, sebab melibatkan warga negara atau masyarakat umum secara langsung, bersifat demokratis sebab melibatkan musyawarah dan partisipasi, membangun kesadaran serta mendorong gagasan dan aspirasi dari akar rumput. Di negara-negara demokrasi, sosial media berfungsi sebagai media alternatif bagi partisipasi politik warga negara karena menjadi media diskusi politik dan mobilisasi virtual (Pew Research Center, 2022; Reuter & Szakonyi, 2013; Waeterloos et al., 2021). Sedangkan bagi negara-negara otoritarian, sosial media menjadi alat dalam melawan penindasan dan ketidakadilan atau paling tidak mempertanyakan akuntabilitas pemerintah (Ding, 2020; Reuter & Szakonyi, 2013). Data yang diperoleh dari sebuah penelitian oleh Pew Research Center (2022) memandang bahwa 57 % dari responden mereka di 19 negara melihat demokrasi sebagai hal yang baik bagi demokrasi karena memberikan informasi mengenai kondisi di negara mereka dan negara lain, mendorong toleransi, serta memberi hak sipil.

Dalam berbagai konteks dan situasi, sosial media telah membawa skala jangkauan gerakan transnasional menjadi lebih luas. Hal ini sebab melalui sosial media menjadi akselerator bagi protes atau dukungan publik dengan cara meningkatkan intensitas dan

kecepatannya (Wolfsfeld et al., 2013, p. 120). Dalam kaitannya dengan aktivisme transnasional, sosial media memiliki fungsi untuk mendukung aktivisme lintas negara. Hal ini sebab sosial media berfungsi menjadi wadah perekrutan yang relatif murah, sekaligus berfungsi dalam penggalangan dana, distribusi informasi dan gambar, diskusi kolektif, dan bahkan mobilisasi untuk aksi yang lebih besar (Wolfsfeld et al., 2013, p. 117).

Melalui sosial media juga, aktivisme transnasional juga memunculkan kehadiran aktor-aktor baru termasuk dalam interaksi hubungan internasional di sosial media. Hal ini sejalan dengan konsep *multiplication of actors*, dimana aktor non-negara terlibat dan mempengaruhi opini publik dan kebijakan luar negeri. Sehingga, pola diplomasi yang sebelumnya hirarkis dan dikendalikan oleh pembuat kebijakan menjadi lebih interaktif (Harris, 2013, p. 21). Dengan kata lain, sosial media menciptakan komunitas global dimana isu lokal dibuat sebagai isu bersama yang berdampak pada siapa saja tanpa memandang gender dan kebangsaannya (Sorice & Dumitrica, 2022, p. 157).

Keberadaan media sosial juga menantang status quo atau kebijakan negara termasuk kebijakan luar negeri yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan publik. Dalam banyak hal, melalui sosial media, aktor-aktor internasional non-negara tersebut mampu membawa pesan perdamaian dan suara individu atau kelompok-kelompok yang terpinggirkan sehingga membawa dampak luas dan mendunia. Ini misalnya dapat dilihat dari bagaimana komunitas African American menggunakan sosial media untuk menyampaikan suara aspirasi mereka melalui kampanye #BlackLivesMatter (Auxier, 2020). Selain itu, penyebaran virus Corona 19 juga menjadi momentum bagi masyarakat di China untuk mempertanyakan kredibilitas pemerintah mereka terutama ketika pemerintah negara tersebut makin memperkuat aturan sensor terhadap dunia maya mereka.

Peran sosial media dalam berbagai peristiwa-peristiwa tersebut tentu secara langsung maupun tidak telah mempengaruhi dinamika global serta stabilitas di berbagai negara dan kawasan. Ini sebab pesan atau informasi tersebut dapat mempengaruhi perilaku, keputusan-keputusan politik internasional ataupun perspektif mengenai ancaman dan kerjasama, bahkan ketahanan demokrasi dan juga stabilitas kawasan. Dengan kata lain, sosial media menjadi alat atau medium bagi penyebaran gagasan dan kekuatan aktivisme global. Bagi negara-negara miskin terutama, internet termasuk sosial media telah menjadi instrumen vital bagi terjadinya perubahan sosial [MP2.1].

Selain itu, sosial media juga dijadikan instrumen oleh aktor negara untuk menyampaikan informasi, berkomunikasi dan bernegosiasi (DIPLO, 2021) melalui postingan, twit, siaran langsung di chanel youtube, berita, talkshow, press release, documentary dan berbagai jenis siaran lainnya. Negara dan berbagai aktor internasional lain menggunakan sosial media. Mulai dari Pemerintah AS yang memiliki akun Youtube The White House atau Kerajaan Inggris yang memiliki akun Youtube The Royal Family Channel. Tokoh dunia seperti Bernie Sanders dan Obama juga memiliki akun Twitter dan Instagram. Data menunjukkan bahwa sekitar dua pertiga dari 193 negara anggota PBB memiliki akun Twitter (Bjola & Holmes, 2015, p. 14). Dengan kata lain, media sosial membawa pembahasan baru terkait hubungan lintas batas negara setiap hari, menghubungkan individu dengan cara yang berbeda, dan membangun pandangan tentang realitas sosial melalui visualisasi digital. Hal ini tentu saja menunjukkan betapa internet telah mengubah interaksi lintas negara yang dilakukan sebelumnya ke mekanisme yang lebih kompleks namun juga lebih mudah.

Sebelum adanya internet yang digunakan secara publik, realitas hubungan internasional hanya berkuat pada bagaimana media massa seperti surat kabar, TV dan radio menjadi instrumen politik penguasa. Dari konteks ini, maka yang ditampilkan hanya melibatkan perspektif dan kepentingan elit atau negara. Namun saat ini sosial media juga banyak digunakan untuk aktivisme transnasional, termasuk di Indonesia. Hal ini sebab sosial media dapat menjadi wadah berkumpul untuk berkolaborasi antar berbagai pemangku kepentingan (Murthy, 2018, p. 1). Selain itu, cakupan sosial media yang luas sehingga isu di suatu negara bisa menyebar ke negara lain sehingga membawa implikasi langsung maupun tidak langsung. Suara dan kepentingan masyarakat luas menjadi terwadahi dengan adanya sosial media, dari yang semula bersifat top-down menjadi tidak dua arah saja (Harris, 2013). Hal ini tentu mempengaruhi situasi global yang terjadi.

Pengaruh sosial media yang mampu mempengaruhi situasi global dapat dilihat dari berbagai fenomena. Hal ini sebab sosial media memiliki kemampuan untuk membangun aksi kolektif (Wolfsfeld et al., 2013, p. 115). Misal, peran twitter dalam mendorong wacana demokrasi di Timur Tengah. Beberapa penelitian menemukan korelasi langsung antara twit mengenai situasi politik di Timur Tengah yang kemudian mendorong aspirasi masyarakat untuk menumbangkan rezim otoriter di negara-negara tersebut. Selain itu, twitter juga digunakan oleh beberapa pemimpin negara seperti Donald Trump yang menggunakan Twitter sebagai alat mendapatkan dukungan untuk retorik politiknya (Ross & Rivers, 2020). Kampanye Obama sendiri sangat massif dilakukan melalui twitter ketika pencalonan presiden AS pada 2008

(Harris, 2013, p. 20). Bahkan pengaruh kampanye melalui media sosial dianggap efektif dalam pemenangannya. Masyarakat dari berbagai kalangan dan negara juga ikut membahas Obama baik ketika menjadi kandidat presiden dan saat menjabat sebagai presiden. Selain itu, peristiwa kematian Ratu Elizabeth II juga menimbulkan pro dan kontra di sosial media. Meski ucapan bela sungkawa dari berbagai pemimpin dunia lewat sosial media mereka seperti yang diposting oleh tokoh dunia seperti Bill Gates (Riyanto, 2022). Namun, tanggapan terkait bagaimana kematian ratu Elizabeth II seharusnya menjadi akhir kolonialisme Inggris juga ramai berseliweran di sosial media (Guardian, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus untuk menganalisis peran sosial media dalam membangun gerakan transnasional di Indonesia. Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis mendalam terhadap fenomena kontemporer yang kompleks dalam konteks kehidupan nyata, khususnya ketika batas antara fenomena dan konteks tidak jelas (Yin, 2018). Pendekatan kualitatif dianggap tepat untuk memahami dinamika sosial media sebagai medium gerakan transnasional yang melibatkan berbagai aktor non-negara, mengingat kompleksitas interaksi dan makna yang terkandung dalam aktivisme digital lintas batas negara (Creswell & Creswell, 2018).

Dari perspektif teoritis Hubungan Internasional, penelitian ini menggunakan kerangka analisis liberalisme institusional yang menekankan peran aktor non-negara dan interdependensi kompleks dalam sistem internasional. Pendekatan ini relevan untuk menganalisis bagaimana sosial media menciptakan ruang baru bagi aktor-aktor non-negara seperti LSM, organisasi masyarakat sipil, dan individu untuk berpartisipasi dalam politik internasional (Keohane & Nye, 2011). Selain itu, penelitian ini juga mengadopsi perspektif konstruktivis yang memandang bahwa identitas dan kepentingan aktor terbentuk melalui interaksi sosial, termasuk interaksi yang terjadi di ruang digital (Wendt, 1999). Perspektif ini membantu memahami bagaimana sosial media tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai ruang pembentukan identitas dan narasi transnasional.

Konsep transnasionalisme dalam penelitian ini merujuk pada teori yang dikembangkan oleh Keck dan Sikkink (1998) tentang jaringan advokasi transnasional (transnational advocacy networks). Teori ini menjelaskan bagaimana aktor-aktor non-negara membentuk jaringan lintas batas untuk mempromosikan perubahan sosial dan politik. Penelitian ini mengadaptasi kerangka "boomerang pattern" yang menggambarkan bagaimana aktivis domestik

menggunakan koneksi internasional untuk memberikan tekanan pada pemerintah mereka melalui arena internasional (Keck & Sikkink, 1998). Dalam konteks digital, sosial media menjadi platform yang memfasilitasi pembentukan dan operasionalisasi jaringan advokasi transnasional ini dengan cara yang lebih efisien dan jangkauan yang lebih luas.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi literatur dan analisis dokumen sekunder. Data dikumpulkan dari berbagai sumber akademik, laporan organisasi internasional, dokumen kebijakan pemerintah, dan publikasi media yang relevan dengan topik sosial media dan gerakan transnasional di Indonesia. Proses pengumpulan data mengikuti pendekatan "document analysis" yang dikembangkan oleh Bowen (2009), dimana dokumen-dokumen yang dikumpulkan dianalisis untuk mengidentifikasi tema, pola, dan tren yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Data yang diperoleh kemudian dikategorisasi berdasarkan tema-tema utama: karakteristik penggunaan sosial media di Indonesia, kasus-kasus gerakan transnasional yang dimediasi oleh sosial media, dan dampaknya terhadap dinamika politik domestik dan internasional Indonesia.

Analisis data dilakukan melalui metode analisis tematik yang mengikuti kerangka kerja yang dikembangkan oleh Braun dan Clarke (2006). Proses analisis dimulai dengan familiarisasi data, kemudian dilanjutkan dengan pengkodean awal, pencarian tema, review tema, definisi dan penamaan tema, serta produksi laporan. Dalam konteks Hubungan Internasional, analisis difokuskan pada identifikasi pola-pola transnasional yang muncul melalui sosial media, mekanisme transmisi isu dari level domestik ke internasional, dan sebaliknya. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, dimana informasi dari berbagai jenis dokumen dibandingkan untuk memastikan konsistensi dan akurasi temuan penelitian.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada ketergantungan pada data sekunder yang mungkin tidak mencakup seluruh aspek dinamis dari penggunaan sosial media dalam gerakan transnasional. Selain itu, penelitian ini tidak melakukan pengukuran kuantitatif terhadap efektivitas atau dampak langsung dari aktivisme digital, melainkan fokus pada analisis kualitatif terhadap pola dan mekanisme yang terjadi. Namun demikian, pendekatan yang digunakan tetap relevan untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang bagaimana sosial media berfungsi sebagai medium dalam gerakan transnasional di Indonesia, khususnya dalam konteks transformasi praktik diplomasi dan politik internasional di era digital (Bjola & Holmes, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peluang dan Tantangan Sosial Media sebagai Medium Gerakan Transnasional

Saat ini negara-negara berkembang tengah menikmati bonus demografi, termasuk Indonesia yang akan memiliki penduduk usia produktif hingga 2045. Penduduk Indonesia saat ini mayoritas adalah orang muda. Menurut Katadata, jumlah kaum muda Indonesia (Generasi Z dan Millennial) mencapai 53,81 persen (Katadata, 2021). Mereka menjadi pasar terbesar untuk berbagai produk. Sebagai penduduk mayoritas, kaum muda Indonesia juga merupakan pengguna internet terbesar (Dimas Jarot Bayu, 2021). Mereka bahkan menggunakan internet lebih dari 7 jam per hari dan kebanyakan menggunakan smartphone untuk mengakses internet (Alvara Strategic Research, 2019). Para millenials juga dikenal memiliki karakteristik Creative, Confident, and Connected (Alvara Strategic Research, 2019).

Kelebihan Indonesia yang tengah mengalami bonus demografi dan negara dengan pengguna internet terbesar di dunia, namun dunia digital masyarakat Indonesia menunjukkan kondisi yang paradoks. Menurut McKinsey, meski pengguna digital Indonesia termasuk paling aktif di dunia dan memiliki ekosistem start-up digital yang dinamis, tetapi secara keseluruhan tertinggal dalam mengoptimalkan manfaat dari teknologi (Das, Kaushik, Michael Gryseesl, Priyanka Sudhir, 2016, p. 4). Selain itu, pengguna internet di Indonesia juga dikenal yang paling kurang sopan dan dianggap gagap soal literasi digital. Menurut Kominfo, terdapat 8.878 kasus hoax yang terjadi sepanjang Agustus 2018 hingga Agustus 2021. Selain itu, Indonesia sendiri menduduki peringkat 74 dari 120 negara pada kategori Readiness dalam indeks Internet Inklusif 2021 (Kementerian Kominfo, 2022).

Di samping itu, ada berbagai kasus yang viral di sosial media yang menyangkut situasi dan kondisi di Indonesia menunjukkan bahwa literasi digital masyarakat Indonesia masih rendah. Pro dan kontra bahkan perang di cyber space seperti Twitter, IG atau Youtube sering sekali terjadi dan menimbulkan kisruh yang panjang. Hal ini terutama dapat dilihat dari tingginya pemberitaan palsu dan misinformasi. Persoalan identitas merupakan topik yang paling sering menjadi sumber kisruh terutama soal agama. Media digital dinilai cukup besar pengaruhnya dalam menimbulkan populisme agama. Ini terjadi sebab media digital menjadi instrumen untuk menyebarkan dan mempromosikan keyakinan, nilai dan praktik-praktik beragama[MP3.1] yang tidak lagi menjadi otoritas lembaga atau pihak tertentu. Meskipun tokoh-tokoh dan pendakwah Islam seperti Quraish Shihab atau Hanan Attaki menjadi acuan belajar mengenai Islam di dunia digital.

Di saat yang sama, pemerintah Indonesia juga masih belum siap dalam menghadapi revolusi digital. Ini dapat dilihat dari persoalan izin beberapa media internasional seperti Netflix. Pemerintah Indonesia meskipun juga melalui Keminfo telah melakukan berbagai upaya sosialisasi dan edukasi digital, seringkali masih sangat birokratis dan lamban dalam mendorong cara-cara yang inovatif dalam menggunakan sosial media untuk kepentingan publik. Mengambil contoh kasus Pedulilindungi dalam penanggulangan dan penanganan Pandemi Covid-19 misalnya. Pemerintah membutuhkan waktu lebih dari setahun untuk bisa menerapkan kebijakan penggunaan Apps tersebut untuk tracking dan tracing data. Selain itu, seringkali akun-akun sosial media pemerintah menghadapi ‘amukan’ pengguna internet jika dinilai tidak cukup mewakili kepentingan atau suara masyarakat. Padahal sosial media sebagaimana media pada umumnya memiliki fungsi sebagai pilar demokrasi untuk mendorong akuntabilitas sosial (Deane, 2015, p. 269). Hal ini menjadi indikasi bahwa demokrasi Indonesia masih belum matang. Salah satu masalah terkait dengan sosial media di Indonesia adalah fakta bahwa media sosial tidak selalu representatif. Hal ini sebab digital gap atau digital divide pengguna internet di Indonesia cukup lebar.

Di sisi lain, meski memiliki berbagai keunggulan sebagai media komunikasi politik termasuk dalam mendorong aktivisme transnasional. Sosial media juga tidak lepas dari kelemahan. Hal ini sebab disparitas yang disebabkan oleh karakteristik sosial media yang mudah dibuat namun juga mudah dihapus. Meski sosial media membuka ruang-ruang diskusi dan percakapan serta menyebarkan informasi. Namun sering kali sosial media gagal dalam membangun komunikasi yang deliberatif karena secara alamiah menjadi media yang “easy entrance, easy exit[MP4.1]”.

Berdasarkan data yang dipresentasikan oleh Kemenkominfo, Indonesia merupakan pengguna internet terbesar di dunia dengan 202,6 juta orang dan rata-rata menggunakan internet 9 jam per hari. Dimana sebanyak 78 persen dari jumlah tersebut melakukan belanja online setiap bulan, 39,2 persen bahkan merupakan pengguna mobile banking dan nilainya sebesar 70 miliar USD. Mereka kebanyakan menggunakan sosial media seperti Facebook dan Instagram serta Whatsapp (Madu, 2018). Dengan kata lain, potensi dunia digital Indonesia sangat besar dan potensial. Hal ini menunjukkan bahwa dunia digital dapat menjadi kekuatan Indonesia untuk mencapai kepentingannya di kancah internasional[MP5.1]. Selain itu, dengan

keterbukaan yang dibawa oleh dunia digital, Indonesia mestinya tidak lagi bergantung pada pola-pola lama untuk melakukan strategi diplomasi. Diplomasi dapat dilakukan melalui dunia digital.

Sayangnya diplomasi digital Indonesia tidak berjalan mengikuti tren tersebut. Hal ini misalnya dapat dilihat dari posisi Indonesia sendiri yang masih berada di posisi ke-12 berdasarkan Digital Diplomacy Index[MP6.1]. Padahal potensinya sebagaimana dikemukakan sebelumnya sangat tinggi. Meski juga telah menjadi bagian dari upaya diplomasi publik Indonesia, potensi diplomasi digital masih belum dikelola secara optimal untuk menghadapi dinamika global yang makin kompleks.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa sosial media memiliki peran yang sangat signifikan dalam memfasilitasi gerakan transnasional di Indonesia. Dengan lebih dari 202,6 juta pengguna internet dan posisi sebagai pengguna Facebook terbesar ketiga di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk memanfaatkan sosial media sebagai medium aktivisme lintas batas negara. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sosial media berfungsi sebagai katalis dalam mentransformasi isu-isu lokal menjadi gerakan transnasional melalui beberapa mekanisme kunci. Pertama, sosial media mampu menghilangkan batasan geografis dan temporal dalam penyebaran informasi, memungkinkan isu-isu domestik Indonesia seperti Demo 212 untuk mendapat perhatian internasional. Kedua, platform digital ini menyediakan ruang demokratis bagi partisipasi aktor non-negara seperti Civil Society Organizations (CSOs) dan Non-governmental Organizations (NGOs) untuk menyuarakan agenda-agenda sosial politik kepada dunia internasional.

Peran sosial media sebagai medium gerakan transnasional di Indonesia menunjukkan karakteristik yang unik. Di satu sisi, sosial media memberikan peluang besar untuk membangun kesadaran global tentang isu-isu yang terjadi di Indonesia dan mendorong solidaritas internasional. Platform seperti Facebook, Twitter, dan Instagram telah membuktikan kemampuannya dalam memobilisasi dukungan publik dan menciptakan narasi alternatif yang mampu menantang status quo. Hal ini sejalan dengan konsep multiplication of actors dalam hubungan internasional, di mana aktor non-negara semakin memiliki peran penting dalam mempengaruhi opini publik dan kebijakan luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvara Strategic Research. (2019). Behaviors and Preferences of Indonesian Millennial Consumers on E-Commerce Applications in 2019.
- Annur, C. M. (2023). Pengguna Facebook di Indonesia Tembus 135 Juta Orang hingga April 2023, Peringkat Berapa di Dunia? Katadata. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/05/29/pengguna-facebook-di-indonesia-tembus-135-juta-orang-hingga-april-2023-peringkat-berapa-di-dunia>
- Auxier, B. (2020). Social media continue to be important political outlets for Black Americans. Pew Research Center. <https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/12/11/social-media-continue-to-be-important-political-outlets-for-black-americans/>
- Belle Wong, J. D. (2023). Top Social Media Statistics And Trends Of 2023. <https://www.forbes.com/advisor/business/social-media-statistics/#source>
- Belli, L., & Horten, M. (2022). Structural Power as a Critical Element of Social Media Platforms' Private Sovereignty. In *Constitutionalising Social Media*. <https://doi.org/10.5040/9781509953738.ch-006>
- Bjola, C. (2016). Digital diplomacy – the state of the art. *Global Affairs*, 2(3), 297–299. <https://doi.org/10.1080/23340460.2016.1239372>
- Bjola, C., & Holmes, M. (2015). Digital diplomacy: Theory and practice. *Digital Diplomacy: Theory and Practice*, 1–238. <https://doi.org/10.4324/9781315730844>
- Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27-40.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using Thematic Analysis in Psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design Fifth Edition*. In SAGE Publications India Pvt. Ltd (Issue 2).
- Das, Kaushik, Michael Gryseesl, Priyanka Sudhir, K. T. T. (2016). Unlocking Indonesia's digital opportunity.
- Deane, J. (2015). A GOVERNANCE PRACTITIONER'S NOTEBOOK: ALTERNATIVE IDEAS AND APPROACHES. In *Governance practitioners Network*.
- Dimas Jarot Bayu. (2021). Jumlah Pengguna Media Sosial di Dunia Capai 4,2 Miliar. Katadata. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/02/18/jumlah-pengguna-media-sosial-di-dunia-capai-42-miliar>
- Ding, J. (2020). Social Media: Threat to or Tool of Authoritarianism? <https://hir.harvard.edu/social-media-threat-to-or-tool-of-authoritarianism/>
- DIPLO. (2021). Internet and social media: A focus on diplomacy - Diplo. <https://www.diplomacy.edu/histories/internet-and-social-media-a-focus-on-diplomacy/>
- Dunbar, R. I. M. (2016). Do online social media cut through the constraints that limit the size of offline social networks? *Royal Society Open Science*, 3(1). <https://doi.org/10.1098/rsos.150292>
- Feindt, G., Gissibl, B., & Paulmann, J. (2021). Introduction: Cultural sovereignty – claims, forms and contexts beyond the modern state. In *Cultural Sovereignty beyond the Modern State*. <https://doi.org/10.1515/9783110679151-001>
- Guardian. (2022). Condolences and condemnation: Indigenous people and people of colour react to the death of Queen Elizabeth II | Indigenous Australians | The Guardian. <https://www.theguardian.com/australia-news/2022/sep/10/condolences-and-condemnation-indigenous-people-and-people-of-colour-react-to-the-death-of-queen-elizabeth-ii>
- Ham, P. Van. (2010). Social power in international politics. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=SGmMAgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1>

- &dq=Social+power+in+international+politics.+Routledge.+&ots=QBuOiNDXuT&sig=wttmLXu71enm_MnZGi96hKn0V24
- Harris, B. (2013). Diplomacy 2.0: The Future of Social Media in Nation Branding. *Exchange: The Journal of Public Diplomacy*, 4(1), 17–32. <https://surface.syr.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1032&context=exchange>
- K.Yin, R. (2018). Case study research and applications: Design and Methods. In Sage Publications: Vol. Sixth.
- Katadata. (2021). Sensus penduduk 2020 penduduk indonesia didominasi gen z dan milenial. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/01/22/sensus-penduduk-2020-penduduk-indonesia-didominasi-gen-z-dan-milenial>
- Kementerian Koinfo. (2022). Mendigitalkan Indonesia. <https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/70/Laptah2021.pdf>
- Keohane, R. (2002). Power and governance in a partially globalized world. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=mhrwsR83vPMC&oi=fnd&pg=PR11&dq=Robert+Keohane+Power+and+Governance+in+a+Partially+Globalized+World&ots=tdquFzHnLc&sig=ukOvFAMFMQj-2dDljmVBae7iY0Y>
- Keohane, R. O., & Nye, J. S. (2011). *Power and Interdependence* (4th ed.). Pearson.
- Keck, M. E., & Sikkink, K. (1998). *Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics*. Cornell University Press.
- Klotz, A., & Prakash, D. (2008). *Qualitative methods in international relations*. Springer.
- Kreps, S. (2020). Social Media and International Relations. In *Social Media and International Relations*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108920377>
- Madu, L. (2018). Indonesia's Digital Diplomacy: Problems and Challenges. *Jurnal Hubungan Internasional*, 7(1). <https://doi.org/10.18196/hi.71121>
- Monika Winarnita, N. B. et al. (2020). et al. <https://www.insideindonesia.org/gerakan-metoo-indonesia>
- Murthy, D. (2018). Introduction to Social Media, Activism, and Organizations. *Social Media and Society*, 4(1). <https://doi.org/10.1177/2056305117750716>
- Pew Research Center. (2022). Social Media Seen as Mostly Good for Democracy Across Many Nations, But U.S. is a Major Outlier | Pew Research Center. <https://www.pewresearch.org/global/2022/12/06/social-media-seen-as-mostly-good-for-democracy-across-many-nations-but-u-s-is-a-major-outlier/>
- Quiano, K., & Griffiths, J. (2016). Blasphemy protests: Indonesian police investigating Christian governor. <https://edition.cnn.com/2016/11/15/asia/jakarta-governor-ahok-indonesia/index.html>
- Reuter, O. J., & Szakonyi, D. (2013). Online social media and political awareness in authoritarian regimes. *British Journal of Political Science*, 45(1), 29–51. <https://doi.org/10.1017/S0007123413000203>
- Riyanto, G. P. (2022). Ucapan Duka untuk Ratu Elizabeth II Mengalir dari Bos-bos Teknologi. *Kompas.Com*. <https://bit.ly/3g85pkA%0AiOS>: <https://apple.co/3hXWJ0L>
- Ross, A. S., & Rivers, D. J. (2020). Donald Trump, legitimisation and a new political rhetoric. *World Englishes*, 39(4), 623–637. <https://doi.org/10.1111/weng.12501>
- Sadiki, L. (2019). The Arab Spring: The 'People' in International Relations. In L. Fawcett (Ed.), *International Relations of the Middle East* (Fourth Ed., pp. 339–367). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/hepl/9780198809425.003.0015>
- Sorce, G., & Dumitrica, D. (2022). Transnational dimensions in digital activism and protest. In *Review of Communication* (Vol. 22, Issue 3, pp. 157–174). <https://doi.org/10.1080/15358593.2022.2107877>
- Sprinz, D. F., & Wolinsky-nahmias, Y. (2016). Models, Numbers, and Cases. *Models, Numbers, and Cases*. <https://doi.org/10.3998/mpub.11742>

- Taylor, P. (2002). *Global Communications, International Affairs and the Media Since 1945*. Global Communications, International Affairs and the Media Since 1945. <https://doi.org/10.4324/9780203429624/GLOBAL-COMMUNICATIONS-INTERNATIONAL-AFFAIRS-MEDIA-SINCE-1945-PHILIP-TAYLOR>
- Verrekia, B. (2017). *Digital Diplomacy and Its Effect on International Relations*. Independent Study Project (ISP) Collection, 30. https://digitalcollections.sit.edu/isp_collection
- Waeterloos, C., Walrave, M., & Ponnet, K. (2021). Designing and validating the Social Media Political Participation Scale: An instrument to measure political participation on social media. *Technology in Society*, 64, 101493. <https://doi.org/10.1016/J.TECHSOC.2020.101493>
- Wang, Y., Chatterjee, R., & Al, E. (2020). #MeToo is at a crossroads in America. Around the world, it's just beginning. *Washington Post*. <https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/05/08/metoo-around-the-world/>
- Wendt, A. (1999). *Social Theory of International Politics*. Cambridge University Press.
- Westcott, N. (2011). *Digital Diplomacy: The Impact of the Internet on International Relations*. SSRN Electronic Journal. <https://doi.org/10.2139/SSRN.1326476>
- Wolfsfeld, G., Segev, E., & Sheaffer, T. (2013). Social Media and the Arab Spring: Politics Comes First. *The International Journal of Press/Politics*, 18(2), 115 –137. <https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1940161212471716>
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). SAGE Publications.